

ABSTRAK

Nama : Akhmad Syarifudin
NIM : 41815110083
Pembimbing TA : Nur Ani, ST, MMSI
Judul : Rancangan Sistem Informasi Pengajuan Dan Pelaporan Pembayaran Tunjangan Kinerja Menggunakan Metode Prototype (Studi Kasus: Kementerian Keuangan RI)

Salah satu upaya untuk dapat meningkatkan *good governance* di lingkungan instansi pemerintah adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah yang memiliki kantor vertikal tersebar di seluruh wilayah Indonesia sangat membutuhkan teknologi informasi dalam mengumpulkan data dan mengolah laporan sehingga diperoleh informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Pembayaran tunjangan kinerja merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap bulan dengan melibatkan 800-an kantor/satker di seluruh wilayah Indonesia. Proses pengajuan dan pelaporan pembayaran tunjangan kinerja dilakukan secara semi manual dan berjenjang dari satker melalui kanwil dan unit eselon I sebelum sampai kepada Biro Perencanaan dan Keuangan. Masalah yang sering terjadi adalah adanya kesalahan input karena redundansi penginputan data dan kesalahan penjumlahan pada saat rekapitulasi. Selain itu data pengajuan dan pelaporan tidak dapat diperoleh secara cepat dan tidak dapat dimonitor secara *real time* karena harus menunggu rekapitulasi semua unit eselon I selesai. Oleh sebab itu, dirancanglah sistem informasi pengajuan dan pelaporan pembayaran tunjangan kinerja Kementerian Keuangan dengan menggunakan metode prototype. Sehingga diharapkan kantor pusat kementerian akan memperoleh informasi kebutuhan dana dan pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja dari satker lebih cepat dan akurat.

Kata kunci:
good governance, remunerasi, kinerja

ABSTRACT

Name : Akhmad Syarifudin
Student Number : 41815110083
Counsellor : Nur Ani, ST, MMSI
Title : Rancangan Sistem Informasi Pengajuan Dan
Pelaporan Pembayaran Tunjangan Kinerja
Menggunakan Metode Prototype (Studi Kasus:
Kementerian Keuangan RI)

One effort to improve good governance within government agencies is utilizing information technology. The Ministry of Finance as a government agency that has vertical offices spread throughout the territory of Indonesia desperately needs information technology in collecting data and processing reports so that accurate and reliable information can be obtained. Payment of performance allowances is a routine activity carried out every month involving 800 offices / work units in all regions of Indonesia. The process of submitting and reporting payment of performance allowances is carried out semi-manually and tiered from the satker through regional offices and echelon I units before reaching the Planning and Finance Bureau. The problem that often occurs is the presence of input errors due to data input redundancy and calculation (data summary) errors at the time of recapitulation. In addition, submission and reporting data cannot be obtained quickly and cannot be monitored in real time because it must wait for the recapitulation of all echelon I units to be completed. Therefore, an information system is designed to submit and report on the Ministry of Finance's performance allowance payments using the prototype method. So that the ministry's head office is expected to obtain information on funding needs and payment of performance allowances from the satker is faster and more accurate.

Key words:

Good governance, remuneration, performance